

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 Landasan Teori

Pada dasarnya penerapan akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kinerja atau akuntabilitas kinerja suatu organisasi. Penerapan akuntabilitas akan mempengaruhi kinerja perusahaan baik sektor publik maupun swasta (Wardini, 2008). Hal ini menyatakan bahwa pentingnya penerapan akuntabilitas untuk mempengaruhi pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan penerapan akuntabilitas keuangan pada instansi pemerintah.

2.1.1 Kejelasan Sasaran Anggaran

2.1.1.1 Pengertian Anggaran (*budget*)

Menurut Nafarin (2013:11) Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Perencanaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses manajemen organisasi. Demikian juga anggaran yang mempunyai posisi sangat penting. Pemikiran strategis di setiap organisasi adalah proses di mana manajemen berpikir tentang pengintegrasian aktivitas ke arah tujuan organisasi. Semakin bergejolak lingkungan pasar, teknologi dan ekonomi, manajemen akan didorong untuk menyusun strategi. Pemikiran strategis manajemen didokumentasikan dalam berbagai dokumen perencanaan. Keseluruhan proses diintegrasikan dalam prosedur penganggaran.

Penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Menurut Kenamom (2023) Partisipasi merupakan salah satu komponen penting dalam proses penganggaran, di mana aliran data anggaran dalam sistem partisipatif dimulai dari tingkat tanggung jawab yang rendah menuju tingkat tanggung jawab yang tinggi. Penganggaran pada sektor publik harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan dan diberi masukan. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dalam satuan moneter (Mardiasomo, 2018:75)

Menurut Hasanah (2021) Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Didalam tampilannya, anggaran selalu menyertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun oleh manajemen dalam jangka waktu tertentu untuk mengungkapkan penerimaan dan pengeluaran secara rinci dalam suatu proyek. Secara sederhana, anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa mendatang.

2.1.1.2 Sasaran anggaran

Anggaran sektor publik adalah instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai

dengan uang publik. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya agar terjamin secara layak (Mardiasmo, 2018:77). Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka buat (Mardiasmo, 2018:75).

2.1.1.3 Definisi Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Suharsono dan Solichin, 2016). Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2015) yang menyatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah manfaat sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran yang tidak efektif dan berorientasi pada kinerja akan dapat mengagalkan perencanaan yang telah disusun (Bastian, 2001). Oleh karena itu, kejelasan sasaran anggaran menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting dalam lingkup pemerintah karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Indra Bastian (2010:191) kejelasan sasaran anggaran adalah suatu rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendanaan yang diharapkan untuk membiayai dalam

waktu periode tertentu. Dapat disimpulkan bahwa, kejelasan sasaran anggaran adalah tujuan dari suatu rencana yang ditentukan secara jelas dan spesifik serta dapat dimengerti pihak yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut dalam waktu periode tertentu.

2.1.1.4 Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Putra (2013:6) indikator kejelasan sasaran anggaran adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Membuat secara terperinci, spesifik, jelas dan dipahami tujuan umum atau tugas-tugas yang harus dikerjakan.

2. Kinerja

Menetapkan kinerja dalam bentuk pertanyaan yang dapat diukur. Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Konsekuensi anggaran berbasis kinerja yang menghubungkan perencanaan strategis (tertuang dalam program) dengan penganggaran (tertuang dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan)

3. Standar

Standar menetapkan target yang dicapai. Sasaran harus menantang untuk dicapai, namun tetap realistis dan masih memungkinkan untuk dicapai.

4. Jangka waktu

Menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan dan suatu anggaran memiliki jangka waktu tertentu dalam membiayai beban yang dikeluarkan. Periode anggaran yang biasanya satu tahun.

5. Sasaran prioritas

Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah.

6. Tingkat kesulitan

Menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan pentingnya.

7. Koordinasi

Menetapkan kebutuhan koordinasi dalam rangka memaksimalkan sumber daya yang tersedia.

2.1.2 Penerapan Akuntansi Sektor Publik

2.1.2.1 Pengertian akuntansi sektor publik

Menurut Haryanto, dkk. (2017:1) menyatakan bahwa, akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Perbedaan sifat dan karakteristik antara akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta disebabkan karena adanya perbedaan lingkup yang mempengaruhinya. Menurut Bastian (2018) Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMD, BUMN, LSM dan yayasan sosial, maupun proyek-proyek sektor publik dan swasta.

Menurut Halim dan Muhammad (2018:3) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas seperti pemerintah, LSM dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

2.1.2.2 Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Penerapan akuntansi sektor publik adalah penerapan akuntansi baik oleh instansi pemerintah serta pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga penyelenggaraan urusan pemerintah dapat optimal (Santoso, 2018). Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan instansi pemerintah yang baik. Perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi sehingga diharapkan *good governace* dapat diwujudkan oleh pemerintah indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (Santoso, 2008).

2.1.2.3 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Dalam beberapa hasil, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkp yang mempengaruhi. Komponen lingkup yang mempengaruhi organisasi sektor publik menurut Biduri (2018:5), antara lain:

1) Faktor ekonomi meliputi antara lain:

- a) Pertumbuhan ekonomi
- b) Tingkat inflasi
- c) Tenaga kerja
- d) Nilai tukar mata uang
- e) Infrastruktur
- f) Pertumbuhan pendapatan perkapita (GNP/GDP)

2). Faktor politik meliputi antara lain:

- a) Hubungan negara dan masyarakat
- b) Legitimasi pemerintah
- c) Tipe rezim yang berkuasa
- d) Elit politik dan masa
- e) Jaringan internasional
- f) Ideologi negara
- g) Kelembagaan

3). Faktor kultural meliputi antara lain:

- a) Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya
- b) Sistem nilai di masyarakat
- c) Historis
- d) Sosiologi masyarakat
- e) Karakteristik masyarakat
- f) Tingkat pendidikan

4). Faktor demografi meliputi antara lain:

- a) Pertumbuhan penduduk
- b) Struktur usia penduduk
- c) Migrasi
- d) Tingkat kedataan

2.1.2.4 Indikator Akuntansi Sektor Publik

Menurut Bastian (2014:19) siklus akuntansi sektor publik, antara lain sebagai berikut:

- 1) Transaksi. Persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain. Transaksi yang dimaksud dalam hal ini adalah transaksi antara organisasi sektor publik dan pihak lain.
- 2) Analisis bukti transaksi. Setiap transaksi yang disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. Dari bukti inilah kemudian akan dianalisis dan digunakan sebagai dasar pencatatan.
- 3) Pencatatan data transaksi. Dari analisis bukti transaksi tersebut akan dilakukan pencatatan atas bukti yang telah terjadi. Pencatatan transaksi
- 4) Pengikhtisaran. Dalam buku besar terdapat daftar nama depan kelompok akun yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan nama akun yang ada, catatan atas transaksi dikelompokkan sesuai dengan namanya masing-masing. Hal inilah yang disebut dengan posting.
- 5) Pelaporan. Selama satu periode akuntansi, transaksi yang dicatat dan dikelompokkan kedalam buku besar kemudian. Berdasarkan catatan tersebut, dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada

pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sektor publik yang telah disusun tersebut kemudian dianalisis untuk menilai.

Menurut Kristiyani, (2019) terdapat tujuh indikator akuntansi sektor publik, yaitu:

- 1) Perencanaan publik
- 2) Penganggaran publik
- 3) Realisasi anggaran
- 4) Pengadaan barang dan jasa
- 5) Pelaporan keuangan publik
- 6) Audit sektor publik
- 7) Pertanggungjawaban publik

2.1.2.5 Kendala Akuntansi Sektor Publik

Menurut Santoso (2018:20) dalam penelitian Putra Mandala menyatakan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis dalam penyajian laporan, dan materialistik, yaitu:

1. Objektivitas

Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen selama

periode waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi stakeholder organisasi.

2. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut-turut.

3. Daya Banding

Laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi lain sejenisnya. Dengan demikian daya banding berarti laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.

4. Tepat Waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Kendala ketepatan waktu penyajian laporan terkait dengan lama waktu penyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik untuk pengambilan keputusan.

5. Ekonomis dalam Penyajian Laporan

Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan dapat berarti bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar dan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut.

2.1.3 Akuntabilitas Kinerja

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja

Menurut Mardiasmo (2012:122), dalam jurnal Yulitiwati dan Anis Feblin menyatakan bahwa Kinerja pemerintah bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat intangible Output, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja daerah/pemerintah. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ukuran kinerja non-finansial. Dengan kata lain bahwa pengukuran kinerja merupakan alat atau metode yang digunakan melalui proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan beberapa produk, jasa, ataupun suatu proses.

Menurut Khoirudin (2024) Suatu pengukuran kinerja akan menghasilkan data, dan data yang telah dianalisis akan memberikan informasi yang berguna bagi peningkatan pengetahuan para manajer dalam mengambil keputusan atau tindakan manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Menurut Septiriane (2018) terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Government*) merupakan kehendak kita bersama. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintah yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik menuju suatu tatanan pemerintah yang lebih baik lagi. Penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Terdapat kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik.

Akuntabilitas secara umum dapat diartikan sebagai permintaan pertanggungjawaban yang diserahkan kepadanya. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Bastian, 2016).

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Mahsun, 2016).

2.1.3.4 Indikator akuntabilitas kinerja

Indikator kinerja pemerintah terdapat beberapa jenis (Mahsun, 2009) yaitu:

1. Indikator masukan (*Input*)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

2. Indikator proses (*Process*)

Indikator proses ini, organisasi/instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

3. Indikator keluaran (*Output*)

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non-fisik.

4. Indikator hasil (*Outcomes*)

Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan keluaran pada jangka menengah (efek langsung)

5. Indikator manfaat (*Benefit*)

Sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

6. Indikator dampak (*Impact*)

Pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Menurut Rosiana (2021) indikator akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yaitu:

- 1) Berdasarkan suatu sistem
- 2) Pencapaian visi dan misi
- 3) Jujur, objektif, transparan dan akurat
- 4) Menyajikan keberhasilan/ kegagalan

2.1.3.5 Prinsip-Prinsip Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Hasanah (2021) Penyusunan laporan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan. Selain itu, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia menerbitkan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang didalamnya memuat beberapa prinsip yang juga harus diperhatikan, diantaranya:

- 1) Prinsip Lingkungan Pertanggungjawaban
- 2) Prinsip Prioritas
- 3) Prinsip Manfaat

2.1.3.4 Tahapan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja

Menurut Hasanah (2021) Akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang kompleks dimana pelaksanaannya dianggap lebih rumit apabila dibandingkan dengan pemberantasan korupsi, karena pemberantasan korupsi sesungguhnya merupakan dampak positif atas terlaksananya akuntabilitas. Mengingat rumitnya pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memuat tahapan-tahapan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berisi:

- 1) Perencanaan strategis
- 2) Perencanaan kinerja
- 3) Pengukuran kinerja
- 4) Pelaporan kinerja

5) Evaluasi kinerja

2.1.4 Hubungan antar variabel independen dan variabel dependen

2.1.4.1 Hubungan Kejelasan Anggaran dengan Akuntabilitas Kinerja

Kejelasan sasaran anggaran merujuk pada tingkat dimana sasaran anggaran dinyatakan secara spesifik, jelas dan dipahami oleh pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhinya. Kejelasan sasaran anggaran memiliki hubungan yang kuat dengan akuntabilitas kinerja. Penelitian yang dilakukan oleh Anjarwati (2012) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini berarti semakin jelas sasaran anggarannya maka semakin mudah untuk dipertanggungjawabkan. Kejelasan sasaran anggaran akan berpengaruh negatif apabila, masalah pada akuntabilitas terjadi karena kejelasan sasaran anggaran yang belum pasti.

2.4.1.2 Hubungan Penerapan Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntabilitas Kinerja

Menurut Nordiawan (2010:35) Akuntansi Sektor Publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial ataupun simultan. Penerapan akuntansi sektor publik memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan obyek pengeluaran (Pamungkas, 2012). Penerapan

akuntansi sektor publik memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap akuntabilitas kinerja.

Penerapan akuntansi sektor publik akan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, apabila memberikan penyajian informasi pertanggungjawaban. Penerapan akuntansi sektor publik akan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja apabila, masalah pada akuntabilitas kinerja terjadi karena penerapan akuntansi publik belum berjalan dengan baik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

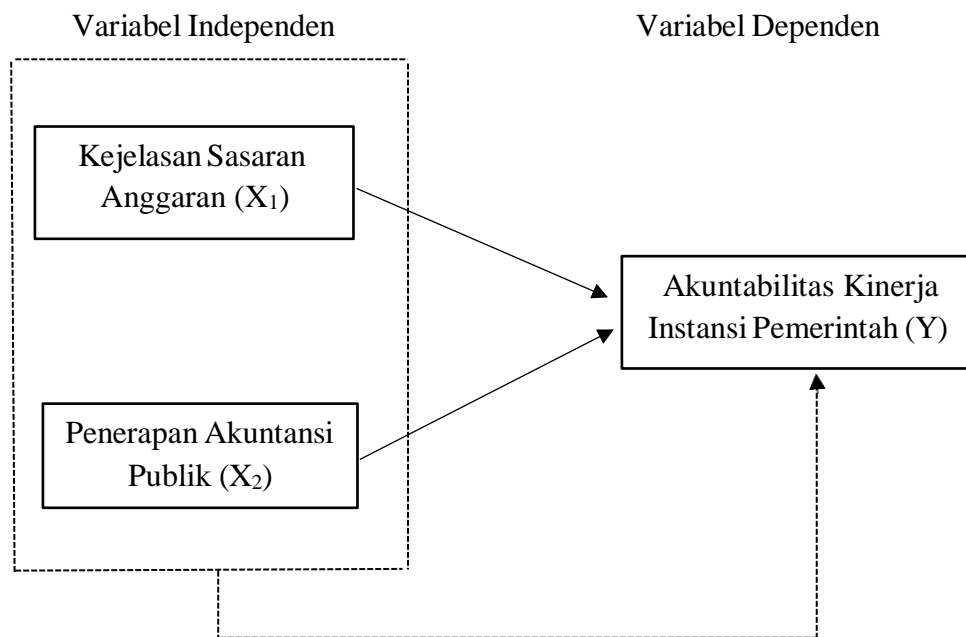
No	Nama Peneliti, Judul Penelitian (Tahun)	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Siska Septiani dkk (2022) “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi (Studi Empiris pada OPD Solok)”.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Kabupaten Solok, penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah OPD Kabupaten Solok.	Variabel: Kejelasan sasaran anggaran, penerapan akuntansi sektor publik dan akuntabilitas	Lokasi penelitian
2.	Sherillia Septiriane (2013) “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Survey Pada DPRD Kota Bandung)”.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja pada DPRD kota Bandung	Variabel: Kejelasan sasaran anggaran, penerapan akuntansi sektor	Lokasi penelitian

			publik dan akuntabilitas	
3.	Mentari Cefrida S, dkk (2014) “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru” JOM FEKON Vol.1 no.2 Oktober 2014	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran yang diterapkan pada instansi pemerintah kota Pekanbaru memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Sedangkan, pengendalian akuntansi, penerapan akuntansi sektor publik dan ketaatan pada peraturan perundangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.	Variabel: Kejelasan sasaran anggaran, penerapan akuntansi sektor publik dan akuntabilitas	Lokasi penelitian Variabel: Pengendalian akuntansi dan ketaatan pada peraturan perundangan.
5.	Atikah Hasanah, (2021) “ Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.	Variabel: Kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Lokasi penelitian dan variabel: Pengendalian akuntansi

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Polancik (2009) kerangka berfikir diartikan sebagai diagram yang berperan sebagai alur logika sistematis tema yang akan ditulis. Hal ini menempatkan untuk kepentingan penelitian, dimana kerangka berpikir tersebut dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian. Pertanyaan itulah yang menggambarkan himpunan, konsep atau mempresentasikan hubungan antara beberapa konsep.

Kerangka pemikiran berikut menggambarkan hubungan antar variabel independen dalam hal ini adalah Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) dan Penerapan Akuntansi Publik (X_2) dan variabel dependennya yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).



Gambar 2.1
Kerangka Teoritis

Keterangan :

- > Parsial
- - - - -> Simultan

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan adanya dugaan atau hubungan antara variabel X dan Y yang akan diuji kebenarannya melalui data yang dikumpulkan dalam penelitian. Berdasarkan kerangka konseptual dan kerangka teoritis yang telah diuraikan diatas pernyataan hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

- H₁ : Diduga Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten OKU.
- H₂ : Diduga Penerapan Akuntansi Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten OKU.
- H₃ : Diduga Kejelasan Sasaran Anggaran dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan.